

JURNAL BU ROSMERY K. 7

ANALISIS KEBIJAKAN

by Basuki Rachmat

Submission date: 19-Jan-2022 03:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 1744047826

File name: JURNAL_BU_ROSMERY_K._7_ANALISIS_KEBIJAKAN.docx (38.25K)

Word count: 5080

Character count: 32679

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENANGANAN COVID `19

Rosmery Elsyie

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
rosmerye8@gmail.com

Abstract

Covid Handling Policy 19 in West Java Province, the Governor of West Java in the implementation of its handling always refers to what is the policy of the central government, the policy of budget recorfusing carried out by the government towards the 2020 state budget, the provincial government also recofuses the provincial and regency / regional budgets City, so that the policies undertaken to overcome the response of Covid 19 always rests on policies made by the central government. Because of the 19th Impact in Indonesia, it has been very serious and has spread in 34 provinces in Indonesia, and nearly 400 districts / cities in Indonesia. The policy of implementing phase 1 PSBB in Depok, Bogor and Bekasi, is an early stage PSBB, because in that area, is a buffer for the Capital City area of DKI Jakarta, where DKI Jakarta is the highest pendemic cluster in Indonesia, and most of the people of West Java, earn a living in Capital of DKI Jakarta. Relocating a budget for handling Covid 19 in West Java is budgeted to reach almost 8 trillion, and added budget relocation in several regencies / cities in West Java, to cope with handling Covid 19, is the seriousness of the local government in handling the Covid 19 problem in West Java. For this reason, researchers are interested in conducting research with the title "Policy Analysis of the Government of West Java Province in handling Covid 19" This study uses descriptive qualitative methods, by studying and analyzing and describing secondary data obtained by researchers and the results achieved are the Implementation of Government Policy West Java Province in handling Covid 19, went very well, and originally West Java was included in a group of 4 (four) major, now getting better and entering the ranks of the top 10 spread of Covid 19 in Indonesia, and some areas have entered the yellow zone and green zone, as well as the blue zone (this paper was released in early July 2020).

Keywords: Policy analysis, Government, West Java, Covid 19.

Abstrak

Kebijakan Penanganan Covid 19 di Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat dalam implementasi penanganannya selalu mengacu apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kebijakan recorfusing anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap APBN tahun anggaran 2020, pemerintah provinsi juga melakukan recofusing anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, sehingn kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi penanggulangan covid 19 selalu berpijak kepada kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat. Dena Dampak covid 19 di Indonesia, sudah sangat serius dan menyebar penularannya di 34 provinsi di Indonesia, dan hampir 400 Kabupaten/Kota di Indonesia. Kebijakan pelaksanaan PSBB tahap 1 di Daerah Depok, Bogor dan Bekasi, merupakan PSBB tahap awal, karena didaerah tersebut, merupakan penyangga daerah Ibu Kota DKI Jakarta, dimana DKI Jakarta merupakan klaster pendemic tertinggi di Indonesia, dan sebahagian besar warga jawa barat, mencari na lkah di Ibu Kota DKI Jakarta. Merelokasi anggaran untuk penanganan covid 19 di jawa barat dianggarkan mencapai hampir 8 triliun, dan ditambah relokasi anggaran di beberapa Kabupaten/Kota se wilayah Jawa Barat, untuk

- menanggulangi penanganan covid 19, merupakan keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan permasalahan covid 19 di Jawa Barat. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid 19 " penelitian ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif, dengan mengkaji dan menganalisis dan mendeskripsikan data-data sekunder yang didapat oleh peneliti dan hasil yang dicapai adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid 19, berjalan sangat baik, dan semula Jawa Barat masuk dalam kelompok 4 (empat) besar, saat ini semakin membaik dan masuk jajaran 10 besar penyebaran covid 19 di Indonesia, dan beberapa daerah sudah masuk zona kuning dan zona hijau, serta zona biru. (tulisan ini dirilis pada awal bulan Juli tahun 2020).

Kata kunci: Analisis kebijakan, Pemerintah, Jawa Barat, Covid 19.

PENDAHULUAN

Musibah virus corona hampir diseluruh wilayah di Indonesia, penyebarannya sangatlah cepat, sehingga dampaknya sangat terasa sekali, dimana dampak social, ekonomi dan kesehatan, sangat dirasakan. Sehingga pemerintah harus melakukan pengambilan kebijakan yang sangat mendesak sekali dengan menganjurkan kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia, untuk dapat bekerja dari rumah, ibadah dirumah, dan sekolah dari rumah, ini dilakukan guna dapat mencegah dan mengurangi masyarakat yang terpapar covid 19.. Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan reconfiguring anggaran pemerintah, ini dilakukan adalah untuk memberikan ruang alokasi anggaran untuk penanganan biaya kesehatan bagi penanganan covid 19 di Indonesia, dimana pemangkasan dan perhitungan kembali alokasi alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah, pada APBN tahun anggaran 2020, dengan dikeluarkan dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), nomor 1 tahun 2020, terkait dengan Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi Covid-19, secara garis besar Perppu tersebut membahas dua hal yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional

dan/atau stabilitas sistem keuangan negara. (<https://www.kemenkeu.go.id/>, 17 Maret 2020).

Covid 19 Perkembangan Covid-19 yang sangat cepat, berdampak pada banyak aspek yaitu diantaranya aspek sosial dan ekonomi. Sektor-sektor yang terdampak diantaranya : Pariwisata, industry, transportasi, dan manufaktur, serta keuangan, dan berbagai pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Lembaga keuangan dunia, seperti IMF, dan Bank Dunia, memperkirakan akan adanya perlemahan ekonomi dunia, dimana saat terjadinya covid 19 ekonomi dunia melemah, tumbuh kisaran minus diangka `3 %, namun Menteri Keuangan menjelaskan khususnya Untuk Indonesia, dikwartal pertama tahun 2020, tetap tumbuh positif walau ditengah pandemic covid 19. (sumber : <https://sukabumiupdate.com/>, 17 April 2020).

Dampak covid 19 dimana penularannya belum dapat dikendalikan dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada angka dibawah 5%. Kondisi ini diperburuk dengan adanya penurunan harga minyak dan gas bumi dengan kisaran USD 30 perbarel pada hal Indonesia sangat tergantung pada harga komoditas. komoditas.

Dengan adanya penurunan pendapatan negara dan daerah yang diakibatkan adanya penurunan aktifitas ekonomi masyarakat sementara terjadinya peningkatan belanja pemerintah, pada bidang kesehatan dan sosial yang diakibatkan covid 19. Pemerintah masih dapat menggunakan dana yang tersimpan. Namun jika pandemi covid 19, tidak kunjung usai dan semakin massif angka

penularannya, maka dapat dipastikan akan mengganggu cadangan dana yang dimiliki pemerintah untuk beberapa bulan kedepan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan yang sangat signifikan dan berdampak kepada likuiditas yang dimiliki pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan kebersamaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, untuk mengerahkan seluruh daya upaya yang dimiliki untuk menangani dampak covid 19 terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dan perlu dilakukan upaya untuk memprioritaskan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan bagi pelayanan bidang kesehatan dan daya beli masyarakat yang semakin merosot tajam akibat dampak covid 19.

Data penyebaran Covid 19 di Provinsi Jawa Barat 20 Juni 2020, 3 (tiga) bulan terakhir yaitu dari bulan April 2020, Bulan Mei 2020 dan Bulan Juni 2020, hingga awal bulan Juli tahun 2020, meliputi, bulan April 2020, dimana pandemic Covid 19 per tanggal 6 April 2020 terinfeksi kasus sebanyak 263 kasus; Sembuh sebanyak 13 orang, dan yang meninggal sebanyak 29 orang, seiring berjalannya waktu kasus terinfeksi Covid 19 di Provinsi Jawa Barat bertambah 1677 orang terinfeksi kasus covid 19, sembuh sebanyak 397 orang dan yang meninggal banyak 123 orang (data pertanggal 19 Mei 2020). Dan pada bulan Juni 2020 kasus terinfeksi sebanyak 2.805 orang, sembuh sebanyak 1.261 orang, meninggal 171 orang.

Pada kawasan Industri-industri di Jawa Barat, seperti Kerawang, Bekasi dan Purwakarta, dimana tekanan industry telah terjadi sejak adanya perang dagang antara China dan Amerika, ditambah dengan dampak covid 19 yang melanda diprovinsi Jawa Barat, dimana wilayah ini sangat terdampak sekali. Sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang dalam. Untuk itu Pemprov Jabar dan Pemerintah melakukan berbagai kajian-kajian, dengan membuat strategi membuka ekonomi lewat leveling atau

membuat level kondisi sebaran Covid-19 yang ada di Jabar. " Treatmen yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga jarak, menggunakan masker bila keluar rumah dan sering mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, serta tidak mengusap mata atau hidung dengan tangan, jika terasa sakit dianjurkan untuk cepat kedokter untuk diperiksa, dan mendapatkan perawatan dari tenaga medis yang disediakan oleh pemerintah. Indonesia harus belajar dari negara seperti Selandia Baru, Jerman, dimana mereka berdamai virus dengan disiplin diri setiap anggota masyarakat dalam menjaga dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Jawa Barat saat ini memegang peran yang amat strategis didalam menopang perindustrian nasional, dimana 20 % pabrik manufaktur di Indonesia berada di Jawa Barat. Dan sebahagian besar manufaktur Jawa Barat ini untuk tujuan ekspor" Automotif, elektronik, tekstil, hampir semua berada di Jawa Barat,"

Pandemi covid 19, juga berdampak kepada dunia pariwisata, karena Jawa Barat dikenal dan terkenal dengan kondisi sumberdaya alam yang sangat indah dan menawan, dimana banyaknya destinasi-destinasi wisata yang terdampak akibat adanya covid 19, bahkan adanya ditutup, hal ini dikarenakan kondisi covid 19 masih dirasakan sangat berdampak kepada para wisatawan yang berujung keobyek-obyek wisata yang berada di provinsi Jawa Barat. Selain dari itu provinsi Jawa Barat juga sebagai penghasil produk-produk pertanian yang selama ini mengisi dan mensuplay pasar-pasar didaerah, dan di berbagai daerah lain di Indonesia. Dengan adanya covid 19 sektor-sektor lain seperti Restoran, Hotel dan Rumah-Rumah makan serta pasar-pasar tradisional dan mall-mall dibatasi operasionalnya. Dan banyaknya petani-petani dan pedagang –pedagang yang tutup bahkan beberapa peternakan yang selama ini mensuplay kebutuhan daging, sebahagian

adanya, dimana pasar induk saat ini mengurangi omzetnya, hal ini dilakukan karena pasokan berkurang. Dan kondisi saat ini petani dan peternak juga mengalami kesulitan untuk menjual komoditasnya, karena pembeli tidak ada. Kondisi ini diperparah dimana petani siap panen, namun petani sangat sulit untuk menjual hasil panennya. Ironinya ditingkat produsen barang berlimpah, tetapi ditingkat pasar harga semakin melambung tinggi, ini diakibatkan tidak adanya barang yang masuk kepasar untuk dijual, dikarenakan pedagang mengalami kesulitan untuk melakukan transaksi, yang diakibatkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat covid 19.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminimalisasi permasalahan ini maka dilakukan kebijakan untuk dapat menyerap hasil panen petani, dengan membuka secara bertahap dengan melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat, secara berhati-hati agar transaksi ekonomi dapat berjalan, dan masyarakat produsen dapat mengirimkan produksinya kepasar-pasar dengan tahapan-tahapan yang harus diikuti. Memang semua ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, bukan hanya pemerintah dan pemerintah daerah saja, tetapi warga masyarakat yang memiliki kelebihan dan kemampuan financial juga harus turut serta membantu, dan dapat bekerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Dampak covid 19 benar-benar telah menghantam berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat luas, sehingga mereka perlu mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki rasa empati bagi sesamanya..

Sementara untuk masyarakat menengah/kecil, selain bansos dari pemerintah pusat, Pemda Prov Jabar bekerja sama dengan PT Pegadaian agar masyarakat tetap bertahan dan mengamankan asetnya. Pemda Provinsi Jabar juga mengeluarkan Bantuan Tidak Terduga untuk menyerap produk APD yang dibuat oleh UKM. "Ini membuat Jawa Barat juga daerah penghasil APD di masa pandemi

ini, sekaligus sedikitnya menyelamatkan ekonomi," kata Rahmat.

Bantuan-bantuan difokuskan adalah untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki keberdayaan lebih dengan memberikan bantuan berupa Bansos.

Kedua, menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi dalam physical distancing, dengan menghidupkan jual beli secara on-line bekerjasama dengan intech. " dan untuk dapat pedagang pada pasar-pasar tradisional dapat mengikuti untuk memasarkan barang dagangan dengan sistim online, kepada para pembeli yang selama ini sudah menjadikan pelanggan tetapnya, atau dengan sistem antar menggunakan ojek online, semua ini harus diupayakan. Contoh kemarin pasar Cikurubuk online di Tasikmalaya, agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tapi dilakukan secara higienis," kata Pribadi. Ketiga, kata dia, BI harus menjaga ketersediaan uang kartel yang higienis juga. "Jadi uang yang keluar dari ATM dari kasir perbankan sudah dikarantina. Jadi ada uang masuk 14 hari harus diam dulu, tidak disentuh. Jadi uang kartel waktu diedarkan ke masyarakat sudah melalui proses sehingga virus diharapkan sudah mati," (sumber: <http://www.ayobekasi.net/read/2020/05/18/6152>, yang peneliti kutip dari Republika.co.id).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah, terkait permasalahan ini dengan judul "Penanggulangan Penanganan Covid 19 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat "

Indetifikasi Masalah

1. Dampak covid sangat dirasakan oleh warga masyarakat di Jawa Barat;
2. Dampak covid, warga masyarakat harus melakukan kegiatan, tetap tinggal dirumah, semua dikerjakan dari rumah;
3. Adanya kebijakan pelaksanaan Pembatasan Berskala Besar yang

diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

4. Lumpuhnya perekonomian warga masyarakat, disebagian besar wilayah Jawa Barat;
5. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan keterbatasan waktu yang peneliti miliki, peneliti membatasi dalam penelitian yang peneliti tulis, dengan mengkaji dan menganalisis dari Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penanganan Covid 19 di Provinsi Jawa Barat “

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti lakukan hanya sebatas, dimana peneliti ingin mengetahui dan mengkaji dan mendiskripsikan terkait dengan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penanganan Covid 19 di Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dapat dikatakan untuk dilaksanakan, dan dirumuskan. Dan implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut (sumber : Lester dan Stewart dalam Agustino (2008: 196).

Model Implementasi Kebijakan Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan diantaranya adalah yaitu:

pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari terdapat perbedaan-perbedaan sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya dua pendekatan ini bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan meliputi :

1. Tujuan harus realistis, dan dapat diukur tingkat keberhasilannya, serta harus didukung oleh sumberdaya yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dari kondisi sumberdaya yang tersedia.
2. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kinerja anggota organisasi yang tersedia, sehingga mereka mendukung akan implementasi kebijakan yang harus dijalankan. Tanpa dukungan mereka, implementasi kebijakan tidak akan dapat dicapai keberhasilannya.
3. Adanya kecenderungan sikap yang menolak dan sikap yang menerima dari para pelaksana, hal ini sangat mungkin dapat terjadi oleh kebijakan yang dilaksanakan, karena dibuat bukan dari hasil musyawarah.
4. Mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik adalah komunikasi yang dijalin antar Organisasi dan aktifitas dalam organisasi tersebut.
5. Implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Sumber :Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142).

Implementasi kebijakan dipengaruhi dua variabel besar meliputi :Menurut Grindle dalam Agustino (2008:192) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu:

1. Isi Kebijakan (*content of policy*) Variabel isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, Jenis manfaat yang diterima oleh target group, Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, Apakah letak dari sebuah program sudah tepat.

2. Lingkungan Implementasi (*konteks of policy*) Variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa dan Tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran. Sumber :Grindle dalam Agustino (2008:192).

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel meliputi :

1. Variabel masalah mencakup: a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
2. Variabel karakteristik kebijakan/ undang-undang mencakup: a) Kejelasan isi kebijakan; b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; c) Besarnya alokasi sumber daya inansial terhadap kebijakan tersebut; d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
3. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
- b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
- c) Sikap dari kelompok pemilih; dan
- d). Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

(Sumber :Mazmanian dan Sebastier dalam Agustino, (2008: 196)

Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam studi implementasi terhadap kinerja yang digunakan atau dipakai oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pokok yang diajukan. yaitu:

- (1) Bagaimana tujuan dan isi dari sebuah kebijakan yang dilakukan;
- (2) Tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan, untuk mencapai tujuan; dan
- (3) Apabila tahapan tersebut dijalankan akan mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak.

Indikator Pengukuran Kinerja

Alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk dapat menilai baik atau buruk kinerja implementasi suatu kebijakan disebut atau adalah indikator. Dalam kebijakan publik indikator merupakan sebuah instrument yang sangat penting untuk melakukan evaluasi kinerja suatu kebijakan publik Dengan adanya indikator maka peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, program atau proyek.

Ciri-ciri indikator yang baik dalam teori kebijakan publik sebagaimana dijelaskan Purwanto (2012: 104) antara lain:

- a. Adanya relevansi dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi.
- b. Indikator yang digunakan harus memiliki kemampuan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi tercapainya tujuan organisasi.

- c. ¹ Data mudah didapat oleh evaluator.
3. Sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka logis pengukuran kinerja implementasi suatu kebijakan kedepan, dimana indikator utama digunakan untuk mengukur kinerja dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu indikator output dan indikator outcome.

Menurut ¹urwanto (2012: 105) langkahlangkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan indentifikasi terhadap policy output dari sebuah kebijakan..
- b. ¹ Melakukan indentifikasi terhadap kelompok sasaran kebijakan atau program, apakah kelompok sasaran tersebut individu, keluarga, komunitas dan lain-lain.
- c. Melakukan indentifikasi frekuensi terhadap penyampaian output yang dilakukan oleh implementer.
- d. Melakukan indentifikasi kualitas produk yang disampaikan oleh implementer kepada kelompok sasaran.

Terkait Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melindungi, adanya permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu didalam mengatasi permasalahan dimaksud, penanggulangan biasanya, proses kegiatan yang dilakukan setelah adanya sebab akibat dari suatu bencana yang timbul, baik bencana bersifat local maupun bencana bersifat nasional dan international..

Terkait Penanganan covid 19.

Penanganan covid 19 meliputi :

1. ⁶ Jika tidak sehat dengan mengalami :
 - a. Badan terkena demam diatas 37 derajat celcius.
 - b. Sering batuk batauk dan pilek dengan mengucurkan air dari

hidung seringkali, napas terasa sesak, atau kesulitan bernapas.

Lakukan dengan mendatangi RS atau Puskesmas terdekat dengan :

- a). Pakai masker yang benar;
- b). ⁶ Jika bersin-bersin tutup mulut dengan tisu atau punggung lengan;
- c). Upayakan jangan pakai kendaraan umum.

⁶ 2. Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes akan melakukan screening suspect COVID-19:

- a. Jika memenuhi kriteria suspect COVID-19, maka Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan COVID19.
- b. Semua sangat tergantung pada diagnose dan keputusan dokter, apa anda harus dirawat, atau tidak, jika terkena suspect covid 19, anda pasti dirawat, dikarantina.

⁸ 3. Jika anda memenuhi kriteria Suspect COVID-19 akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulans fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri (APD).

4. Di RS rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi.

Covid 19 adalah wabah virus yang menyerang manusia melalui kontak langsung antara manusia, adapun gejala yang ditimbulkan adalah adanya batukbatuk dan in luenza dan demam tinggi diatas 37 derajat, hingga menyerang pernapasan manusia, Covid 19, masuk ke Indonesia sejak awal bulan maret, dimana adanya warga masyarakat terinfeksi Covid 19, lalu menularkan kebeberapa daerah di Indonesia, basis penularan berada di DKI Jakarta, menjadi pandemic covid 19, yang penularannya sangat cepat, lalu masuk kedaerah Jabodetabek, dimana wilayah ini adalah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, sehingga penyebaran didaerah sangat cepat,

dengan adanya penyebaran yang sangat cepat pemerintah melakukan kebijakan untuk melakukan *social distancing* dan *physical distancing*, serta kebijakan untuk warga masyarakat untuk belajar dirumah, bekerja dari rumah, ibadah dirumah, serta melakukan PSBB tahap I, di beberapa wilayah yang terkena pandemic Covid 19, Pemerintah provinsi Jawa Barat, yang wilayahnya terdampak covid 19, berada didaerah wilayah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, antara lain Depok, Bogor dan Bekasi, untuk PSBB tahap awal dilakukan di Daerah ini, dikarenakan wilayah semakin meluas, maka yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat adalah dengan melakukan PSBB di Wilayah Kota Cimahi, dan PSBB di Bandung Raya, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasik Malaya.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah, atau analisis atas hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut pendapat Arikunto (2010:3), Penelitian deskriptif adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki keadaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan hasil yang dipaparkan dalam bentuk laporan hasil penelitian”.

Penelitian deskriptif membuat deskripsi tentang gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis induktif. Hal ini terkait belum jelasnya permasalahan dan bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2011:245) “ Analisis data kualitatif adalah bersifat Induktif “ Analisis yang

digunakan dalam penelitian ini berdasar kepada pengetahuan khusus, dengan didukung oleh fakta-fakta yang unik, dan dirangkai untuk dijadikan solusi pemecahan masalah secara umum. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengkaji dan menganalisis serta mendiskripsikan data-data yang peneliti dapatkan dari data sekunder, yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Terkait dengan Kebijakan Relokasi Anggaran APBN dan APBD..

Data-data yang peneliti dapatkan dari penjelasan Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Serta melakukan Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melihat dan mendatangi daerah-daerah yang terdampak Covid 19 dengan protokol kesehatan, diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang. Kota Bandung sekitarnya. Untuk melihat secara langsung kondisi saat diberlakukannya PSBB tahap 1 dan tahap 2 serta PSBB tahap 3, dan PSBB transisi di beberapa zona hijau, di provinsi Jawa Barat serta penyesuaian dengan kebiasaan baru (new normal) yang akan diberlakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Data tersebut peneliti jadikan bahan analisis dan kajian untuk dapat dideskripsikan sebagai tulisan ilmiah dalam tulisan kali ini.

HASIL DAN BAHASAN

Covid 19 terdampak di Provinsi Jawa Barat, awalnya adalah didaerah Depok, Bogor dan Bekasi, dimana daerah tersebut termasuk daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, pada saat itu DKI Jakarta, merupakan wilayah pandemic virus corona, yang terdampak sangat tinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Sebagian besar warga Depok, Bogor dan Bekasi, merupakan warga yang mencari na kah di daerah DKI Jakarta, sebagai pegawai swasta, pegawai negeri (PNS) dan tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi

di DKI Jakarta, serta buruh-buruh di beberapa pabrik yang berada di wilayah DKI Jakarta, sehingga 3 daerah tersebut di wilayah Provinsi Jawa Barat¹³ terdampak awal penularan Covid 19 di Provinsi Jawa Barat, hampir rata-rata penduduk Jawa Barat yang bekerja di DKI Jakarta terkena penularan virus corona, sehingga virus corona menyebar keseluruh wilayah provinsi di Jawa Barat, banyaknya hilir mudik warga masyarakat Jawa Barat, yang melakukan kegiatan, sehingga begitu cepat wabah penyeberan¹⁷ mpai di wilayah Jawa Barat, di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga kebijakan pemerintah Jawa Barat, akhirnya melakukan PSBB di beberapa wilayah seperti PSBB di wilayah Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Garut dan Tasikmalaya, dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB ini, maka penularan Covid 19, dapat dihambat, dengan warga masyarakat melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Angka penularan covid 19 di Provinsi Jawa Barat tergolong semula masuk 4 besar, secara tahap³⁹ dengan kebijakan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota se Jawa Barat, maka posisi tersebut mulai menurun menjadi posisi dibawah 5 besar di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Provinsi Jawa Barat

1. Melakukan refocusing anggaran APBD, dengan menyediakan atau mengalokasikan anggaran penanganan covid di provinsi di Jawa Barat sebesar, 8 triliun, ditambah dengan relokasi anggaran dimasing-masing APBD Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Melakukan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) di beberapa Kabupaten/kota terdampak covid 19, secara terpadu, sehingga berdampak adanya penutupan ruang-ruang gerak warga masyarakat di Jawa Barat : misalnya selama pandemic belum selesai dan diberlakukannya PSBB

ditutup daerah-daerah wisata di seluruh Provinsi di Jawa Barat, baik wisata budaya, wisata kuliner dan wisata alam dan wisata kunjungan ke kebun binatang di Jawa Barat, serta wisata-wisata lain, sehingga berdampak kepada aktifitas warga masyarakat, dan berdampak kepada aktifitas kegiatan ekonomi warga masyarakat.

3. Menutup untuk sementara waktu tempat-tempat ibadah bagi daerahdaerah zona merah terdampak covid 19,
4. Menutup semua sekolah dan perguruan tinggi di Jawa Barat, dimana pendidikan dianjurkan dan dilaksanakan secara daring dari rumah, sehingga aktifitas pendidikan tetap berjalan..³³
5. Menyiapkan rumah-rumah sakit, sebagai rumah sakit r¹³kan covid 19 di provinsi di Jawa Barat, di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Penutupan aktifitas pertokoan, termasuk pasar-pasar tradisional di Jawa Barat, khususnya di daerah zona merah..
7. Melakukan pemeriksaan rapid test secara massal di beberapa wilayah-wilayah zona merah, zona kuning di wilayah provinsi Jawa Barat, dengan bekerja sama dengan dinas³⁰ kesehatan..
8. Memberikan bantuan sembako, bagi warga masyarakat yang terdampak covid 19, di beberapa wilayah⁹ di Kabupaten/ Kota bekerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat;
9. Melakukan evaluasi secara intens atas pelaksanaannya.

Beberapa bantuan diterima oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dari para donator yang turut serta berpartisipasi dalam penanganan covid 19 di provinsi Jawa Barat jelas Kang Emil sebutan yang akrab bagi Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19 di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, menjelaskan bahwa kepedulian masyarakat

yang mampu di Jawa Barat sangat tinggi, dimana bantuan datang dari orang pribadi atau kelompok, mereka memberikan bantuan berupa, alat-alat kesehatan, bahan pokok, uang tunai, bantuan yang terus berdatangan ini menunjukkan masyarakat Jawa Barat sangat peduli akan kondisi sebahagian masyarakat lainnya yang terdampak covid 19. Selain bantuan-bantuan tersebut Gubernur juga mengharapkan bantuan berupa masukan dari pemikiran-pemikiran para cendekiawan, dan para ilmuwan, untuk sumbangsih pikirannya bagi penanganan masalah covid yang melanda Provinsi Jawa Barat. Serta sumbangan yang berbentuk dalam ketenaga sukarelawannya apa pun itu untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terdampak covid 19 di Jawa Barat, dalam rilisnya di Bandung, Jumat (1/5/2020). Kang Emil sapaan Ridwan Kamil menyaksikan Ketua Umum Jabar Bergerak Atalia Ridwan Kamil menerima sejumlah bantuan, baik berupa Alat Pelindung Diri (APD), pangan, dan uang tunai. Bantuan tersebut berupa 5 unit desinfektan chamber dari PT Taspen (Persero) KCU Bandung, Alat Pelindung Diri (APD) penanganan Covid -19 senilai Rp500 juta dari Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jabar, uang tunai sebesar Rp350 juta dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV (PTS) Jabar, 30.350 dus susu pertumbuhan dari Danone, dan 25 ton beras dari PT Bandung Eco Sinergi Teknologi (Eco Racing). Begitu besarnya perhatian dan para usahawan yang ada di Jawa Barat akan kondisi Jawa Barat saat ini masuk dalam zona merah covid 19.

(sumber: <http://brt.st/6yQN>, yang ditulis oleh Bernardus Wijayaka “ Jabar Bergerak Kembali Terima Bantuan Penanggulangan).

Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB Tahap I, Tahap II dan Tahap III, serta PSBB transisi, maka

pemerintah provinsi Jawa Barat melakukan beberapa kebijakan dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat, yaitu melakukan kebiasaan baru (new normal) dengan membuka beberapa kegiatan warga masyarakat di provinsi Jawa Barat, khususnya kegiatan ekonomi warga masyarakat jawa barat, dengan membuka pertokoan, mall, pasar-pasar tradisional dan tempat-tempat wisata, dengan tetap melakukan protokol kesehatan, dan membatasi jam kunjungan serta jumlah pengunjung hanya berkisar 50 %, secara bertahap, dan membuka rumahrumah ibadah kembali dengan jumlah pengunjung yang beribadah diatur secara bergantian tidak berdesak-desakan atau tetap menjaga jarak disaat beribadah. Kebijakan ini sangat dirasakan oleh warga masyarakat di wilayah provinsi jawa barat, sehingga kegiatan ekonomi warga masyarakat terlihat mulai menggeliat dan secara perlahan tumbuh kembali. Namun apabila ditemukan adanya warga masyarakat yang terinfeksi virus corona kembali, maka lokasi tersebut ditutup selama 3(tiga) hari untuk dilakukan sterilisasi dengan dilakukan penyemprotan desinfektan oleh petugas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Serta di daerah-daerah keramaian tersebut dijaga dan diawasi oleh aparat TNI, POLRI dan SATPOLPP untuk melakukan pengawasan dalam implementasinya. Semua ini dilakukan guna mencegah adanya warga masyarakat atau milik tempat-tempat usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan standar dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Dengan penerapan kebiasaan baru di provinsi di Jawa Barat, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, diharapkan adanya pengurangan angka penularan covid 19, warga masyarakat dapat beraktifitas kembali di era new normal, perekonomian masyarakat dapat berjalan kembali dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan positif di Jawa Barat.

SIMPULAN

Simpulan ini dibuat dengan melihat bahasan sebelumnya, dimana⁹ yang dikerjakan atau diupayakan oleh provinsi Jawa Barat, bersama-sama pemerintah Kabupaten¹⁹/Kota se Jawa Barat bersama – sama tim gugus tugas pengendalian penanganan Covid 19, dan dibantu oleh aparat keamanan TNI, PLORI dan SAT POL PP, berjalan dengan baik, sehingga penekanan angka penularan covid 19 di Jawa Barat dapat dikendalikan, dan beberapa daerah saat ini, masuk kepada wilayah zona hijau, seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, dan beberapa Kabupaten/Kota dimana angka penularannya dibawah angka 10, sehingga¹⁵ nua dapat dikendalikan, dengan penerapan kebiasaan baru (new normal), diharapkan, masyarakat⁴³ dapat beraktifitas kembali seperti biasa tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, karena mereka beraktifitas dalam suasana masih adanya pandemic virus corona, saat ini. Warga masyarakat di Jawa Barat, sangat⁴² berkontribusi dalam pelaksanaan PSBB tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, serta PSBB transisi menuju ad¹⁷ si kebiasaan baru (new normal), sehingga pemerintah provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, saat ini bersama dengan dinas-dinas terkait mulai membuka kembali kantor-kantor dinas, dengan membatasi pengunjung yang dating, disetiap kantor, bagi yang berusia, diatas 50 tahun keatas, disarankan untuk tetap bekerja dari rumah, dan beraktifitas tetap di rumah, serta pemerintah belum⁴⁵ ngizinkan untuk beroperasi kembali sekolah-sekolah baik sekolah dasar sampai perguruan tinggi se Jawa Barat, hal ini sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan tahun ajaran baru, pendidikan masih dilaksanakan dari rumah dengan system daring (on line), pada proses pembelajaran. Dan lokasilokasi tempat ibadah juga masih beroperasi dengan cara membatasi warga masyarakat yang berkunjung, dalam arti beribadah secara

bergantian dengan menjaga jarak satu dengan yang lain, termasuk pertokoan, mall-mall dan pasar tradisional dibatasi jam operasionalnya, dan warga masyarakat yang berkunjung diwajibkan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Bisa saja daerah yang tadinya sudah masuk zona hijau, akan menjadi zona kuning atau merah, jika adanya warga masyarakat yang terinfeksi virus corona meningkat di wilayah itu, bahkan angkanya naik secara sikni ikan.

SARAN

¹¹ Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat, sudah sangat baik, dalam menanggulangi penanganan pandemic covid 19 di provinsi Jawa Barat, namun walaupun sudah berjalan secara bersinergis, perlu diperhatikan dan diawasi unit-unit yang bertanggungjawab, dalam penanganan covid 19, agar penanganannya dapat sesuai dan dipertanggungjawab secara akuntabel, baik dana²⁸ ana yang diterima dari para donator, dan dana-dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Khususnya penyaluran bantuan-bantuan yang harus disampaikan kepada warga masyarakat dan institusi kesehatan yang berjuang didalam mengatasi wabah covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- ⁴ Arikunto (2010-265) Teknik pengumpulan data atau metode observasi
- ⁴⁹ kunto (2010-3) metode penelitian diskriptif.
- ⁴⁵ Sugiyono (2011:245) " Analisis data kualitatif
- Sugiyono (2011:222) yang menjadi instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif
- ⁴ Sugiyono (2011: 233) " Tujuan dari wawancara semi terstruktur
- ²⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020.
- ¹⁹ Data Gugus Tugas Pengendalian dan Penanganan Covid 19 di Jawa Barat.
- <https://sukabumiupdate.com/>, 17 April 2020).



<http://brt.st/6yQN>, yang ditulis oleh Bernardus
Wijayaka

<http://www.ayobekasi.net/read/2020/05/18/6152>,
Republika.co.id.

JURNAL BU ROSMERY K. 7 ANALISIS KEBIJAKAN

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.unila.ac.id Internet Source	7%
2	republika.co.id Internet Source	3%
3	investor.id Internet Source	2%
4	text-id.123dok.com Internet Source	2%
5	blamakassar.e-journal.id Internet Source	1%
6	yudhykreshwantoro.blogspot.com Internet Source	1%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
8	www.suara.com Internet Source	1%
9	bappeda.jabarprov.go.id Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
11	jurnal.umb.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
13	docobook.com Internet Source	<1 %
14	mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
15	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %
16	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
17	pusbindiklatren.bappenas.go.id Internet Source	<1 %
18	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
19	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
20	www.botodayaan-rongkop.desa.id Internet Source	<1 %
21	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %

22

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

<1 %

23

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1 %

24

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

25

yusranlapananda.wordpress.com

Internet Source

<1 %

26

www.inilahkoran.com

Internet Source

<1 %

27

Anton Aulawi. "PENERBITAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020 SEBAGAI STRATEGI
KEBIJAKAN PAJAK PEMERINTAH INDONESIA
DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI
COVID-19 TERHADAP KEUANGAN NEGARA",
Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan
Keuangan, 2020

Publication

<1 %

28

cutdar.blogdrive.com

Internet Source

<1 %

29

jurnal.fdk.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

30

www.kodimbantul.com

Internet Source

<1 %

31	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
32	anisavitri.wordpress.com Internet Source	<1 %
33	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
34	www.bppt.go.id Internet Source	<1 %
35	bekasikab.go.id Internet Source	<1 %
36	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	<1 %
37	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
38	hanungprabowo.wordpress.com Internet Source	<1 %
39	id.scribd.com Internet Source	<1 %
40	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
41	tribratanews-pasuruan.com Internet Source	<1 %
42	unnes.ac.id Internet Source	<1 %

43	www.govserv.org Internet Source	<1 %
44	www.kompas.tv Internet Source	<1 %
45	www.korem044gapo.mil.id Internet Source	<1 %
46	www.medcom.id Internet Source	<1 %
47	akurat.co Internet Source	<1 %
48	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
49	lakonjaputraarsy.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off